

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Diantara permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah kemiskinan dan ketimpangan, dewasa ini pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah (PR) menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Barat setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sangat tinggi, hal itu dibarengi oleh rendahnya penurunan angkakemiskinan di Sumbar. Efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Salah satu kriteria dalam pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Kemiskinan di Indonesia pada zaman orde baru berhasil ditekan dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi, dan program program penanggulangan kemiskinan yang dirasa tepat sasaran salah satunya program mobilitas penduduk nasional “migrasi”, pada masa itu jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan menurun, dari setengah dari jumlah penduduk indonesia, sampai hanya 11 persen yang berada dibawah garis kemiskinan. Namun, Pada masa krisis ekonomi tahun 1998 angka kemiskinan di Indonesia pun naik dari 11 persen menjadi 19,9 persen pada akhir tahun 1998.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan (Soegijoko dalam Ibnussalam 2003).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Menurut World Bank salah satu penyebab dari kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang juga dapat diterima. Selain penyebab kemiskinan tersebut dikarenakan yang disebutkan di atas penyebab lain adalah dikarenakan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan tingkat kesehatan yang kurang memadai.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya pasal 27 ayat 2. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun (2002-2016), dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan Kemiskinan Sumatera Barat  
Tahun 2002-2016

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Gini Ratio	Kemiskinan (%)
2002	4,69	0,27	11,24
2003	5,26	0,27	11,24
2004	5,47	0,29	10,46
2005	5,73	0,30	10,89
2006	6,14	0,28	12,51
2007	6,34	0,30	11,90
2008	6,88	0,29	10,57
2009	4,28	0,30	9,45
2010	5,94	0,33	9,44
2011	6,34	0,33	8,99
2012	6,31	0,35	8
2013	6,08	0,34	7,56
2014	5,88	0,32	6,89
2015	5,52	0,34	7,31
2016	5,26	0,33	7,09

Sumber : *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat*

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah fluktuatif. Pada tahun 2002 sampai tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup pesat dan puncaknya pada tahun 2008 yaitu sebanyak 6,88%. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu dari 6,88% menjadi 4,28%. Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan, dan di tahun 2013 sampai 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 6,08% di tahun 2013 menjadi 5,26% di tahun 2016.

Pada gini ratio pada tahun 2002 sampai pada tahun 2005 gini ratio di Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 0,27 pada tahun 2002 sampai 0,30 pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 sampai tahun 2009 gini ratio di Sumatera Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 gini ratio di Sumatera Barat sebesar 0,28. Pada tahun 2007 gini ratio di Sumatera Barat naik sebesar 0,30. Pada tahun 2008 gini ratio di Sumatera Barat turun sebesar 0,29. Pada tahun 2009 gini ratio di Sumatera Barat naik sebesar 0,30. Pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan dari 0,33 di tahun 2010 hingga mencapai 0,35 di tahun 2012. Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 gini ratio di Sumatera Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 gini ratio di Sumatera Barat mencapai 0,34. Pada tahun 2014 gini ratio mengalami penurunan sebesar 0,32. Pada tahun 2015 gini ratio mengalami kenaikan sebesar 0,34 dan pada tahun 2016 gini ratio mengalami penurunan sebesar 0,33.

Dari tahun 2003 sampai tahun 2016, kemiskinan Sumatera Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2003 kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 11,24%. Pada tahun 2004 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 10,46%. Pada tahun 2005 kemiskinan di Sumatera Barat naik menjadi 10,89%. Pada tahun 2006 kemiskinan di Sumatera Barat naik menjadi 12,51%. Pada tahun 2007 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 11,90%. Pada tahun 2008 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 10,57%. Pada tahun 2009 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 9,45%. Pada tahun 2010 kemiskinan Sumatera Barat turun menjadi 9,44%. Pada tahun 2011 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 8,99%. Pada tahun 2012 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 8%. Pada tahun 2013 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi

7,56%. Pada tahun 2014 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 6,89%. Pada tahun 2015 kemiskinan di Sumatera Barat naik menjadi 7,31%. Dan pada tahun 2016 kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 7,09%.

Naiknya tingkat kemiskinan di daerah salah satunya diakibatkan oleh turunnya pengeluaran pemerintah, turunnya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Cara Untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan salah satunya dengan cara sistem perpajakan yang progresif, dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat termiskin, ini dirancang supaya mengurangi ketimpangan dan menjaga efisiensi anggaran (Bank Dunia 2016).

Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang diterapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincoln Arsyad 1986).

Menurut (Sudibyo 1995) mengatakan bahwa apabila berbicara mengenai kemiskinan dinilai secara mutlak, Sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dengan terjadinya fenomena fenomena ekonomi di Sumatera Barat, khususnya menyangkut

ketimpangan yang tidak lepas dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, maka penulis tertarik untuk melihat permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul

## **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat ”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Ketimpangan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat?

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau Kegunaan dari Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta.

2. Sebagai acuan bagi pihak terkait baik pemerintah maupun pihak swasta, terutama bagi pemerintah daerah dalam memajukan daerah supaya bisa mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama di bidang ekonomi makro dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri sebagai berikut :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini di kemukakan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian tersebut, kemudian hipotesis dan sistematika penulisan proposal ini yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

##### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian ini, misalkan teori pertumbuhan ekonomi, teori ketimpangan, dan teori kemiskinan, selain ini bab ini juga berisi tentang kerangka konseptual dan penelitian terdahulu.

##### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, definisi operasional

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, serta metode metode analisis yang digunakan.